

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATA AIR DARI  
KERUSAKAN DAN PENCEMARAN AKIBAT PEMBANGUNAN  
APARTEMEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Apartemen Di  
Dusun Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**



**Diajukan oleh :**

**SINDY HARDIYANTARI**

<b>NPM</b>	<b>: 170512927</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Pertanahan Dan Lingkungan Hidup</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATA AIR DARI**  
**KERUSAKAN DAN PENCEMARAN AKIBAT PEMBANGUNAN**  
**APARTEMEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Apartemen Di**  
**Dusun Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**



**Diajukan oleh :**

**SINDY HARDIYANTARI**

<b>NPM</b>	<b>: 170512927</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Pertanahan Dan Lingkungan Hidup</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 16 November 2020**

**Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATA AIR DARI  
KERUSAKAN DAN PENCEMARAN AKIBAT PEMBANGUNAN  
APARTEMEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Apartemen Di  
Dusun Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

<b>Hari</b>	<b>: Senin</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 21 Desember 2020</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Via zoom (online)</b>

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** :

**Sekretaris** :

**Anggota** :

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

“Ada cita-cita yang harus diwujudkan, ada masa depan yang harus dipersiapkan dan orangtua yang harus dibahagiakan, jangan menyerah dengan keadaan”.

“Kita ingin skip masa-masa gelapnya. Padahal sulit mencari bagian terangnya kalau tidak melewati bagian gelapnya dulu”.

“Memang melelahkan, tetapi perjalanan tetap harus dilanjutkan. Sampai setelah kelelahan ini berlalu, kita pasti bangga menjadi sosok yang lebih kuat.”

“Work hard on silence, the moves you are making can do all the talking”.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum / skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan saudara lahirku berempat yang selalu memberkati, melindungi membimbing dan menjagaku serta memberi kekuatan dan kesabaran untuk selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan dalam keadaan senang maupun susah termasuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Teristimewa dalam hidupku untuk kedua orang tuaku, Bapak (I Wayan Nastra) dan Mama (Ni Ketut Suyani) tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, dukungan dan kepercayaannya yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan untuk diri saya sendiri, terimakasih telah gigih berjuang dan bertahan sampai bisa berdiri pada titik ini dengan melewati berbagai kesulitan, hambatan dan tantangan yang selama ini ada. Terimakasih sekali.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mata Air Dari Kerusakan Dan Pencemaran Akibat Pembangunan Apartemen di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Apartemen Di Dusun Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” ini dengan lancar dan sesuai dengan yang di inginkan. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat kelulusan dan menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dalam hal penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai hal kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai sepanjang hidup. Saudara lahirku berempat yang selalu membimbing dan menjagaku serta memberi kekuatan dan kesabaran untuk selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan dalam keadaan senang maupun susah termasuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan, saran serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, semangat, masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Dosen Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
7. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karwayan/karyawadi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Ibu Ratna Wahyu M, ST, M.Eng, M.Eng. selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis serta memberikan arahan, pendapat bagi penulis.
9. Bapak Muhammad Arif Asnawi, S.Si, MM. selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis serta memberikan arahan, pendapat bagi penulis.
10. Bapak Arif Wibowo. S. KM. MM selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Kabupaten Sleman yang telah

bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis serta memberikan arahan, pendapat bagi penulis.

11. Bapak Jumariadi selaku Kepala Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya menemani penulis melakukan penelitian di sumber mata air Padas Gempal.
12. Bapak Mugiman selaku warga Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang telah bersedia melakukan wawancara serta menemani penulis dalam melakukan penelitian di sumber mata air Padas Gempal.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah sangat membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
14. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak I Wayan Nastra dan Mama Ni Ketut Suyani yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, mendukung baik berupa moral maupun material, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dari penulis dalam setiap hal yang penulis lakukan serta ucapan terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan segalanya yang selalu Bapak dan Mama berikan yang terbaik bagi penulis.
15. Seluruh Keluarga besar Hardy Family yang memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.



16. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Claesia Tiffany Aulia Putri, Florentina Dani dan Isfandiya Maulidina yang selalu memberi semangat, mendengar keluh kesah penulis, berproses bersama selama perkuliahan dan menghibur penulis disaat sedih maupun suntuk.

17. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Ce Juanitoz, Ce Maria dan Ko Hendra yang selalu ada, menghibur dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

18. Teman-teman KKN UAJY Kelompok 22 Ari, Belinda, Clara, Firdaus, Hans, Maria, Mario, Veliana dan Komang yang mengerti keadaan penulis yang sedang mengerjakan penulisan hukum/skripsi dan memberikan semangat, dukungan kepada penulis.

Dalam penulisan hukum / skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang penulis tulis tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis memohon kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar penulisan hukum / skripsi ini menjadi jauh lebih baik. Demikian penulisan hukum / skripsi yang penulis susun semoga bermanfaat bagi pembaca dan sesama. Terimakasih, Ida Sang Hyang Widhi memberkati.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Penulis,



Sindy Hardiyantari

## **ABSTRACT**

*A spring is the center of groundwater discharge that appears on the ground as a flow from groundwater flow which is formed due to the cutting of ground flow by local topography and water coming out of rocks. The use of springs is very diverse, including for daily needs such as: cooking, bathing, drinking, irrigation, fisheries and for tourism objects. The construction of flats has the potential to increase the water deficit, reduce the quality and discharge of ground water and can damage or even pollutes springs if they do not pay attention to the preservation of the surrounding environment. This research aims to analyze proper legal protection and determine the efforts and constraints so that it can provide solutions to water sources from damage and pollution due to the construction of flats in Candi Karang Hamlet, Sardonoharjo Village, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. The research was conducted using survey and observation method. A number of interviewees and respondents from the authorities and local community leaders were interviewed in a free and structured manner to obtain data on water sources/spring. The results showed that the protection of the spring law was not fully realized, there were still a number of violations. The efforts of related agencies can be combined with efforts of the local community regarding the protection of local springs, in order to obtain maximum and effective protection.*

*Keywords: springs, damage, pollution, apartment, legal protection.*

## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN HUKUM / SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Batasan Konsep.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>

<b>H. Penulisan Hukum/Skripsi .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Prinsip Perlindungan Hukum .....	20
3. Bentuk Perlindungan Hukum .....	21
<b>B. Tinjauan tentang Air .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Air .....	22
2. Pengelolaan Sumber Daya Air .....	Error! Bookmark not defined.
3. Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha .....	22
<b>C. Tinjauan tentang Pembangunan .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pembangunan .....	24
2. Macam-Macam Pembangunan .....	24
3. Pembangunan dan Masalah Lingkungan .....	25
4. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan .....	26
<b>D. Tinjauan tentang Apartemen .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Apartemen .....	26
2. Asas dan Arah Pembangunan Apartemen .....	27
3. Tanah Untuk Pembangunan Apartemen .....	28
<b>E. Tinjauan tentang Pencemaran .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	29

2. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup.....	30
<b>F. Tinjauan tentang Perusakan .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup.....	31
<b>Hasil Penelitian.....</b>	<b>32</b>
1. Monografi Kabupaten Sleman .....	32
2. Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
3. Perlindungan Hukum Terhadap Mata Air Dari Kerusakan dan Pencemaran Akibat Pembangunan Apartemen di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Apartemen di Dusun Candi Karang, Ngaglik) .....	40
4. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Mata Air Padas Gempal .....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Sindy Hardiyantari

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam aspek kehidupan masyarakat dan merupakan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Pada daerah pedesaan utamanya, pemenuhan kebutuhan air banyak bersumber dari mata air. Oleh karena itu, sangat penting perlindungan terhadap mata air tersebut guna menjaga kualitas air yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat setempat.

Menurut Tolman, mata air adalah pusat keluarnya air tanah yang muncul dipermukaan tanah sebagai arus dari aliran air tanah. Mata air terbentuk akibat terpotongnya aliran tanah oleh bentuk topografi setempat dan air keluar dari batuan. Seperti halnya di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo yang terletak di Kabupaten Sleman ini mempunyai sepuluh (10) sumber mata air yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Mata air di Dusun Candi Karang memiliki karakteristik yaitu : mata air gravitasi (*gravitational springs*) yang muncul akibat oleh gaya gravitasi dan keluar akibat terpotongnya topografi seperti yang telah dikemukakan oleh Bryan (1919) dalam Todd (2005), berdasarkan sebab terjadinya

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 292.

mata air dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu : mata air oleh tenaga non gravitasi (*non gravitational springs*) dan mata air oleh tenaga gravitasi (*gravitational springs*).<sup>2</sup>

Menurut data hasil BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diprediksi meningkat sebanyak 271.066.000 juta jiwa.<sup>3</sup> Dari banyak pulau yang terdapat di Indonesia, pulau Jawa adalah salah satu pulau yang kepadatan penduduknya mengalami peningkatan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat ini mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal, tetapi tidak sebanding dengan ketersediaannya saat ini. Oleh karena itu, munculah alternatif pemecahan masalah tempat tinggal di daerah padat, yaitu pembangunan perumahan yang lebih mengarah pada pembangunan secara vertikal atau struktur bertingkat yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah rumah susun atau apartemen.<sup>4</sup>

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan yang sangat penting. Landasan hukum pengaturan mengenai rumah susun atau apartemen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. Semua penyelenggaraan pembangunan baik itu rumah susun, apartemen, *condominium* termasuk *flat* dan *town house* mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Hal ini

---

<sup>2</sup> Wahyu Santosa Langgeng, 2006, "Kajian Hidrogeomorfologi Mata Air Di Sebagian Lereng Barat Gunung Api Lawu", *Forum Geografi*, Volume 20 Nomor 1, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/252/Langgeng%20Wahyu%20Santosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 29 September 2020.

<sup>3</sup> Serafica Gischa, Jumlah Penduduk Indonesia 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>, diakses 29 September 2020.

<sup>4</sup> Arie S Hutagalung, 2007, *Kondominium dan Permasalahannya*, Volume 2, Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, hlm 2.



disebabkan karena di Indonesia sendiri belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang apartemen. Selain itu, rumah susun ataupun apartemen memiliki kesamaan dalam fungsi dan pendefinisian hak dan kewajiban pemilik unitnya, sehingga kesemuanya menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagai acuan dan pedoman.<sup>5</sup>

Kehadiran pembangunan rumah tinggal secara vertikal ini semakin marak di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Menurut Dosen Perencanaan Wilayah Kota UGM, Bapak Widodo Dwi P, hingga 2021 akan ada 15 apartemen yang sudah beroperasi, ditambah 2 apartemen dalam tahap perizinan, totalnya ada 17 apartemen.<sup>6</sup> Salah satu yang terkena dampak keramaian pembangunan apartemen ini adalah di daerah Kabupaten Sleman, karena lokasinya yang strategis dan ramai menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.

Pembangunan apartemen sangat berpotensi menambah defisit air, berkurangnya kualitas dan debit air tanah bahkan secara tidak langsung dapat merusak sumber mata air sekitar. Permukaan air tanah khususnya di Kabupaten Sleman terus menurun setiap tahunnya, maka dari itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan guna membatasi alih fungsi

---

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari, 2018, "Pemilikan Kondominium Hotel/Kondotel Di Bandung, Jawa Barat", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6 Nomor 3, Universitas Trisakti, hlm. 334.

<sup>6</sup> <https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/09/tahun-ini-lima-apartemen-dibangun/>, diakses pada 29 September 2020.

lahan.<sup>7</sup> Maraknya pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra oleh masyarakat sekitar. Karena berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah rusaknya sumber mata air yang digunakan sehari-hari oleh warga setempat.

Hakikat pembangunan adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Usaha ini harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Dalam pembangunan apartemen harus memenuhi tiga (3) persyaratan, yakni persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan ekologis. Persyaratan administratif adalah persyaratan yang berkaitan dengan izin yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan apartemen, selanjutnya persyaratan teknis adalah persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan, kesehatan, lingkungan, rancang bangun termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susun dan persyaratan ekologis adalah persyaratan yang berkaitan dengan pemenuhan analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan rumah susun maupun apartemen.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Danu Damarjati, Sri Sultan HB X: Problem Besar DIY Yakni Pembatasan Mal dan Hotel, <https://news.detik.com/berita/d-3678830/sri-sultan-hb-x-problem-besar-diy-yakni-pembatasan-mal-dan-hotel>, diakses pada 29 September 2020.

<sup>8</sup> Niniek Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 36.

<sup>9</sup> S Amarendra, R Suharto, Aminah, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Apartemen Utara Yogyakarta Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam *Diponegoro Law Review Journal*, Volume 5, Nomor 2, Hal 2.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya setiap pembangunan pasti akan menimbulkan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Warga Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Yogyakarta menolak pembangunan sebuah apartemen dekat tempat tinggal mereka karena dilatarbelakangi ketakutan akan rusaknya sepuluh (10) sumber mata air Padas Gempal Penguripan Candi Karang di Sungai Klandoan.<sup>10</sup> Warga Dusun Candi Karang menggantungkan hidup mereka pada sumber mata air tersebut untuk keperluan pengairan pertanian dan sumber daya ikan.

Hal yang ditakutkan oleh warga sekitar adalah kerusakan ekologis yang sangat sulit diperbaiki jika sudah terjadi. Warga berusaha menolak pembangunan apartemen tersebut karena kesadaran mereka untuk menjaga sumber mata air dan kelestarian Padas Gempal Penguripan Candi Karang sebagai akibat dari proses pembangunan ini yang diprediksi akan terus berlanjut. Permasalahan yang dialami oleh warga Dusun Candi Karang yang telah menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap pembangunan apartemen yang merusak sumber mata air mereka.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Mata Air Dari Kerusakan Dan Pencemaran Akibat Pembangunan Apartemen di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Apartemen di Dusun Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).

---

<sup>10</sup> M Nurhadi, Berpotensi Rusak Sumber Mata Air Warga Tolak Pembangunan Apartemen, <https://jogja.suara.com/read/2020/06/26/111739/berpotensi-rusak-sumber-mata-air-warga-tolak-pembangunan-apartemen?page=all>, diakses pada 29 September 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mata air dari kerusakan dan pencemaran akibat pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ?
2. Apa saja upaya dan kendala bagi perlindungan hukum terhadap mata air dari kerusakan dan pencemaran akibat pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang tepat terhadap mata air dari kerusakan dan pencemaran akibat pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala serta memberikan solusi bagi perlindungan hukum terhadap mata air dari kerusakan dan pencemaran akibat pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hukum lingkungan yang berhubungan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Mata Air Dari Kerusakan Dan Pencemaran Akibat Pembangunan Apartemen Di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses perlindungan hukum, antara lain :
  - a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu instansi yang terkait dalam proses perlindungan hukum dan berwenang dalam hal mengambil keputusan dan tindakan perlindungan hukum, dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman serta Dinas Pekerjaan Umum dalam Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Sleman. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menegakan peraturan pembangunan apartemen yang menimbulkan dampak bagi lingkungan serta warga sekitar pembangunan tersebut.
  - b. Bagi Masyarakat, yaitu masyarakat yang terkena dampak khususnya di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Ngaglik,

Kabupaten Sleman dengan adanya rencana pembangunan apartemen untuk memberikan informasi dan edukasi bahwa saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sekitar sangatlah penting dan berpengaruh dalam rencana suatu pembangunan.

- c. Bagi Pemrakarsa, sebagai bahan informasi serta masukan bahwa peran masyarakat sekitar khususnya yang terkena dampak dalam proses pembangunan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada fakta sosial yang sedang terjadi masa kini, dalam hal ini penelitian memiliki karakteristik yang relatif sama dengan tema kajian

1. Skripsi oleh Ari Jonathan dengan NPM 150511973, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, yang berjudul : Perlindungan Kualitas Udara Melalui Penataan Hutan Kota Pada Tahun 2009-2014 Di Kabupaten Sleman. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kualitas lingkungan udara melalui penataan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman dan kendala serta solusi dalam perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman. Adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten

Sleman kurang efektif karena kurangnya luasan hutan pada kota akibat dari alih fungsi lahan. Serta adapun kendala pelaksanaan perlindungan hukum mengenai kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten Sleman adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang uji emisi, perawatan kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus.

2. Skripsi oleh Guweni dengan NPM 140512750, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014 yang berjudul : Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Di Kabupaten Bantul. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul dan kendala serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul. Adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan belum maksimal, karena belum ada pengolahan limbah padat sehingga menyebabkan pencemaran udara serta kurang pengawasan dan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terhadap Kebun Buah Mangunan. Adapun kendala dalam pelaksanaan perlindungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan adalah sumber air yang masih terbatas sehingga tanaman-tanaman di

Kebun Buah Mangunan kering, kurangnya kesadaran dari wisatawan atau pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Untuk itu perlunya upaya untuk pembuatan sumur agar tanaman-tanaman di Kebun Buah Mangunan tetap subur serta diperlukan adanya kebijakan berupa sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan dari pihak Kebun Buah Mangunan.

3. Skripsi oleh I Wayan Bayu Risma Ahadiguna dengan NPM 150512082, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar dan upaya dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum pada kawasan sempadan sungai ayung tersebut. Adapun hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum pada kawasan Sempadan Sungai Ayung berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar belum terwujud secara maksimal karena banyaknya pemanfaatan ruang yang belum sesuai ketentuan arahan serta banyak kawasan hijau masih didirikan bangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



sudah melakukan pengendalian terhadap ketersediaan ruang di Kabupaten Gianyar dengan cara pengawasan dan penindakan terhadap bangunan khususnya di daerah hijau. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mewujudkannya dengan pemberian surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan yang melanggar dan cukup berjalan efektif.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasi segala macam kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>11</sup>

##### **2. Mata Air**

Mata air adalah sumber air potensial yang digunakan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Nilai mata air bukan hanya dari kualitasnya saja, namun juga dari aspek kuantitasnya. Nilai mata air dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.<sup>12</sup>

##### **3. Perlindungan Mata Air**

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>12</sup> Ogi Setiawan, Perlindungan Mata Air di Tatanan Normal Baru: Sebuah Tinjauan Praktis, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3164/perlindungan-mata-air-di-tatanan-normal-baru-sebuah-tinjauan-praktis](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3164/perlindungan-mata-air-di-tatanan-normal-baru-sebuah-tinjauan-praktis), diakses pada 5 Oktober 2020.

Perlindungan mata air merupakan upaya untuk memulihkan, menjaga dan melindungi mata air, baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Konsep perlindungan mata air ini mencakup spektrum keruangan yang luas, tidak hanya di daerah sekitar titik mata air saja, tetapi meliputi seluruh daerah tangkapan air (DTA) mata air.<sup>13</sup>

#### 4. Pencemaran

Pencemaran lingkungan adalah bahaya yang mengancam kelestarian lingkungan, yaitu ekosistem dari suatu lingkungan.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup”.<sup>15</sup>

#### 5. Kerusakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Abdul Khair, dkk, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97-98.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 6. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya perubahan yang dilandasi pada suatu pilihan pandangan yang tidak bebas dari pengalaman sejarah, realitas keadaan yang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.<sup>16</sup>

## 7. Apartemen

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, menyatakan bahwa Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun baik secara horizontal maupun vertikal, yang merupakan satuan serta dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah.<sup>17</sup>

Apartemen adalah tempat tinggal bertingkat, lengkap, yang terletak pada suatu lantai, yang merupakan bangunan bertingkat yang terbagi atas beberapa tempat tinggal.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang difokuskan pada fakta sosial dan berupaya untuk melihat dan meneliti hukum dalam pengertian yang nyata di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Adapun pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara pada

---

<sup>16</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/324/3/2MTS01428.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apartemen>, diakses pada 5 Oktober 2020.

<sup>19</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

responden dalam hal ini masyarakat sekitar sumber mata air Padas Gempal yang terkena dampak akibat pembangunan apartemen serta Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai narasumber.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

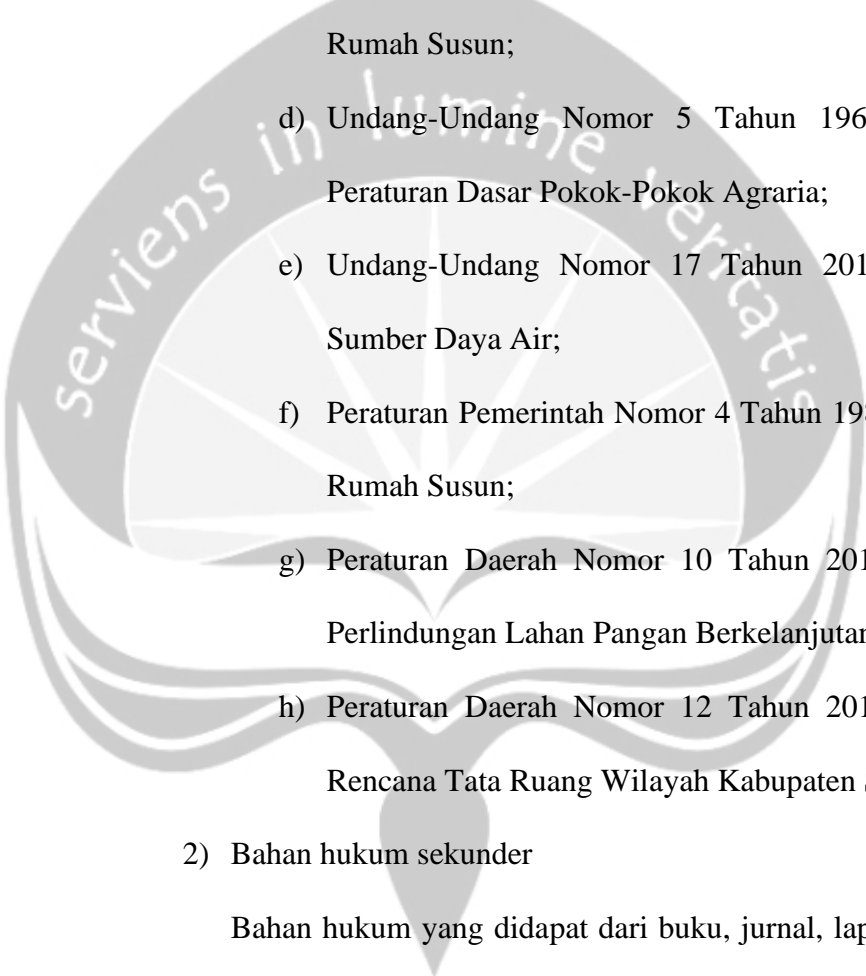
- 1) Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Sleman;
- 2) Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Kabupaten Sleman;
- 3) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Kabupaten Sleman;
- 4) Kepala Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- 5) Masyarakat Dusun Candi Karang yang terkena dampak.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
  - g) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
  - h) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, kamus dan narasumber berkaitan dengan perlindungan hukum, mata air, kerusakan dan pencemaran lingkungan dan pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardinoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, percakapan serta tanya jawab antara pewawancara dengan responden dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara terlebih dahulu.
- a. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi/ Tempat Penelitian

Penelitian bertempat di Desa Sardonoarjo, Dusun Candi Karang, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta serta penulis melakukan penelitian secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

### 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai suatu kesamaan berupa ciri. Pada penelitian ini, penulis menggunakan populasi terhitung, yaitu masyarakat sekitar sumber mata air yang terkena dampak akibat rencana pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman.

## 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang tergantung dari karakteristik populasi. Pada penelitian ini, penulis menentukan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan ciri-ciri khusus tertentu yang terakait dengan tujuan penelitian, antara lain wakil masyarakat terkena dampak, daerah yang berpotensi paling banyak terkena dampak, wakil yang mewakili masyarakat yang masih kontra dengan pembangunan apartemen. Oleh karena itu berdasarkan kriteria-kriteria diatas terpilih 4 (empat) sampel yaitu perwakilan masyarakat terkena dampak Dusun Candi Karang yang adalah Kepala Dusun Candi Karang serta seorang perwakilan dari warga yang terkena dampak.

## 7. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah wakil masyarakat sekitar sumber mata air yang terkena dampak akibat rencana pembangunan apartemen di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman yaitu :

- a. Bapak Jumariadi selaku Kepala Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- b. Bapak Mugiman selaku warga Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman yang terkena dampak kerusakan sumber mata air akibat pembangunan apartemen.

Adapun narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang telah diperoleh dari responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Ibu Ratna Wahyu M, ST, M.Eng, M.Eng. selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Kabupaten Sleman;
- b. Bapak Muhammad Arif Asnawi, S.Si, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Sleman;
- c. Bapak Arif Wibowo. S. KM. MM selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Kabupaten Sleman.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan, berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Cara yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah cara deduktif, yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan secara umum dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.



## **H. Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum, tinjauan mengenai air, tinjauan mengenai pencemaran, tinjauan mengenai kerusakan, tinjauan mengenai pembangunan, tinjauan mengenai apartemen serta selanjutnya berisi hasil penelitian.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran dari penulis.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Mata Air Dari Kerusakan dan Pencemaran Akibat Pembangunan Apartemen Di Dusun Candi Karang, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran pembangunan oleh investor dalam hal ini pembangunan apartemen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendirian dan pembangunan apartemen diatas sumber mata air Padas Gempal di Sungai Klandoan juga. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan apartemen di khususnya di Kabupaten Sleman serta melakukan penindakan dan penegakan hukum yang diperlukan terhadap pembangunan apartemen yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri khususnya diatas sumber mata air dan sungai yang terancam kerusakan dan pencemaran.
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap mata air Padas Gempal di Sungai Klandoan antara lain : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan sosialisasi kepada para pemrakarsa atau investor pembangunan

apartemen serta memberikan surat pemberitahuan kepada para pembangun yang melanggar, Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air memberikan perlindungan secara sosial yaitu dengan pembentukan OPMA (Organisasi Pengelolaan Mata Air) untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada masyarakat sekitar mata air terhadap mata air. Perlindungan secara teknis berupa pembuatan penurapan dan konservasi untuk melindungi mata air sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar, seperti : membuat bangunan (pemandian) untuk masyarakat, kebutuhan air minum berupa saluran air, kolam untuk mencuci serta irigasi, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan secara teknis berupa konservasi sungai dan sumber mata air, penanaman tanaman pelindung mata air, dan upaya adaptasi bagaimana agar terhadap kemarau, sumber mata air tersebut tidak terjadi kekeringan, yang kemudian memberikan apresiasi atas peran masyarakat dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

3. Kendala yang di hadapi dalam perlindungan hukum terhadap mata air Padas Gempal di Dusun Candi Karang lebih ke masyarakatnya itu sendiri karena belum bisa mewadahi semua mata air serta belum semua mata air dapat dilakukan panurapan dan tidak semua mata air dimanfaatkan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman khususnya terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan di sekitar sumber mata air, sehingga para pemrakarsa pembangunan lebih memahami aturan dan ketentuan terkait pembangunan serta kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak awam.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah cukup bagus dan maksimal dalam melakukan upaya perlindungan hukum serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan pembangunan apartemen, tetapi bisa lebih ditingkatkan lagi kinerja dalam hal pengawasan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran pembangunan yang dapat merugikan warga sekitar maupun Pemerintah Kabupaten Sleman itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Khair, dkk. 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Arie S Hutagalung, 2007, *Kondominium dan Permasalahannya (Edisi Volume 2)*, Badan Penerbit FH-UI, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Cetakan Pertama)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Deni Bram, 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing-Anggota IKAPI, Bekasi.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Niniek Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (Cetakan Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia (Edisi Pertama)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*, Ui Press, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya Serta Penerbitan Sertifikatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sleman.

#### **Jurnal**

Amarendra S, dkk. 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Apartemen Utara Yogyakarta Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Diponegoro Law Review Journal*, Vol. 5 Nomor 2, Universitas Diponegoro.

Elsi Kartika Sari, 2018, Pemilikan Kondominium Hotel/Kondotel Di Bandung, Jawa Barat, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 Nomor 3, Universitas Trisakti.

Wahyu Santosa Langgeng, 2006, Kajian Hidrogeomorfologi Mata Air Di Sebagian Lereng Barat Gunung Api Lawu, *Forum Geografi*, Vol. 20 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada.

#### **Website/Internet**

Serafica Gischa , 2020, Jumlah Penduduk Indonesia, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>.

Danu Damarjati, Sri Sultan HB X: Problem DIY Yakni Pembatasan Mal dan Hotel, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3678830/sri-sultan-hb-x-problem-besar-diy-yakni-pembatasan-mal-dan-hotel>.

M Nurhadi, Berpotensi Rusak Sumber Mata Air Warga Tolak Pembangunan Apartemen, diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2020/06/26/111739/berpotensi-rusak-sumber-mata-air-warga-tolak-pembangunan-apartemen?page=all>.

Selviyani, *Strata Title*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2517/strata-title/>.

Ogi Setiawan, Perlindungan Mata Air di Tatanan Normal Baru: Sebuah Tinjauan Praktis, diakses dari [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3164/perlindungan-mata-air-di-tatanan-normal-baru-sebuah-tinjauan-praktis](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3164/perlindungan-mata-air-di-tatanan-normal-baru-sebuah-tinjauan-praktis).

<https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/09/tahun-ini-lima-apartemen-dibangun/>, diakses pada 29 September 2020.

<http://e-journal.uajy.ac.id/324/3/2MTS01428.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2020.

<http://eprints.umm.ac.id/49782/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apartemen>, diakses pada 3 Oktober 2020.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/1424-kedudukan-hukum-rumah-susun-di-indonesia.html>, diakses pada 3 Oktober 2020.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses tanggal 22 Oktober 2020.

<http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 23 Oktober 2020.